



**SEKADAU** - Sejarah baru diukir Pemerintah Kabupaten Sekadau dalam hal pengelolaan keuangan daerah. Setelah dalam beberapatahun terakhir pengelolaan keuangan hanya mampu menuai opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP), pengelolaan anggaran tahun 2012 lalu akhirnya sukses mendapat predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan RI Perwakilan Kalbar.

Jumat (13/9) pekan lalu, Bupati Sekadau Simon Petrus bersama Ketua Komisi B DPRD Kabupaten Sekadau Aron, menerima predikat WTP dari Kepala BPK Perwakilan Kalbar Adi Sudiby di kantor BPK RI Perwakilan Kalbar, Jalan A Yani Pontianak.

Kepala BPK RI Perwakilan Kalbar, Adi Sudiby menjelaskan, pemeriksaan dan laporan hasil pemeriksaan merupakan amanah Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara. Laporan Hasil Pemeriksaan merupakan rapor bagi pengelolaan keuangan daerah selama satu tahun anggaran.

Namun predikat tersebut, lanjut Adi, bukanlah hadiah dari BPK, melainkan hasil dari kerja keras Pemkab dan DPRD Sekadau dalam mengelola dan mengawasi penggunaan keuangan negara.

BPK Kalbar mengharapkan Pemkab Sekadau mampu mempertahankan predikat yang sangat baik dalam pengelolaan keuangan negara

## Sekadau Raih WTP

## Pemeriksaan

## Keuangan TA 2012

tersebut pada tahun-tahun berikutnya.

"Biasanya mempertahankan predikat ini sulit. Maka kami berpesan peranan inspektorat harus diperkuat. Kunci untuk mendapatkan predikat WTP adalah komitmen kepala daerah dan DPRD," kata Adi Sudiby.

Bupati Sekadau Simon Petrus mengaku bangga atas keberhasilan Pemkab Sekadau meraih predikat WTP. Predikat itu merupakan kali pertama yang dicapai Pemkab Sekadau selama menjadi daerah otonomi baru. Hasil tersebut, kata Simon, berkat pengawasan secara berkesinambungan serta dukungan DPRD Kabupaten Sekadau.

"Saya berterimakasih kepada semua pihak yang terlibat secara teknis dalam

pengelolaan keuangan daerah termasuk DPRD Kabupaten Sekadau atas opini WTP yang diberikan oleh BPK kepada Kabupaten Sekadau. Pemkab Sekadau akan berusaha mempertahankan prestasi yang diperoleh ini. Harapan saya, melalui prestasi ini dapat meningkatkan motivasi dan semangat kerja pegawai dalam menggunakan anggaran," tutur Simon Petrus.

Diakui Simon, ia selalu mengingatkan setiap Satker yang ada di lingkungan Pemkab Sekadau untuk memanfaatkan anggaran dengan benar dan tepat sasaran agar tidak menimbulkan masalah di kemudian hari.

Terpisah, Ketua DPRD Kabupaten Sekadau Aloysius mengatakan, pihaknya telah berusaha semaksimal mung-

kin untuk melakukan fungsi pengawasan dalam penyelenggaraan pemerintahan sebagaimana diamanatkan UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.

Salah satu trik jitu yang dijalankan DPRD yakni dengan meningkatkan intensitas komunikasi agar penggunaan keuangan negara yang dilaksanakan aparat pemerintah lebih tepat sasaran dan sesuai dengan harapan masyarakat.

"Dan kita juga berharap prestasi WTP yang diperoleh Pemkab Sekadau agar bisa dipertahankan sehingga hasil audit tahun 2013 nanti bisa meraih opini WTP lagi. Saya juga ingatkan kepada semua jajaran Pemkab Sekadau agar bekerja sesuai dengan aturan yang berlaku, bekerja dengan jujur dan mengedepankan

akuntabilitas dan profesionalisme," ujarnya dikonfirmasi via telepon seluler.

Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atau Unqualified Opinion yang diberikan BPK merupakan Laporan Keuangan (LK) yang disajikan secara wajar dalam semua hal berupa material, posisi keuangan (neraca), hasil usaha atau Laporan Realisasi Anggaran (LRA) dan Laporan Arus Kas, sesuai dengan prinsip akuntansi yg berlaku umum.

Penjelasan laporan keuangan juga telah disajikan secara memadai, informatif dan tidak menimbulkan penafsiran yang menyesatkan. Sedangkan istilah Wajar dimaksudkan bahwa Laporan Keuangan bebas dari keraguan dan ketidakjujuran serta lengkap informasinya. (Bny)